

RINGKASAN

Sistem pemerintahan erat kaitannya dengan tiga poros kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada sistem pemerintahan yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, yang mana dalam menjalankan tugasnya antara kedua kekuasaan tersebut terjadinya saling kontrol dan saling mengimbangi. Pada masa pemerintahan Joko Widodo Periode Pertama terdapat permasalahan yakni revisi UU KPK, revisi UU ITE. Pada masa pemerintahan Joko Widodo Periode Kedua terlihat beberapa permasalahan yakni berupa pembentukan undang-undang secara cepat atau *fast track* yang terdiri dari revisi UU KPK, revisi UU MK dan pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law*. Selain itu terjadi juga terhadap revisi UU Minerba, pada akhir periode melakukan revisi UU No. 16 Tahun 2010, revisi keempat UU MK. Adanya praktik tersebut menunjukkan hilangnya mekanisme *checks and balances* antara pemerintah dengan DPR.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, spesifikasi penelitian berupa deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan histori, metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, problematika *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif pada masa pemerintahan Joko Widodo di bidang legislasi adalah pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan proses pembentukan. Pertama, tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional. Kedua, proses dilakukan dengan cara cepat (*fast track legislation*). Ketiga, tidak adanya partisipasi masyarakat bermakna (*meaningful participation*) pengabaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mensyaratkan tiga prasyarat yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang dibenarkan. Keempat, pembahasan dilakukan pada masa transisi (*lame duck session*). Dampak dari problematika *checks and balances* antara legislatif dengan eksekutif pada masa Pemerintahan Joko Widodo di bidang legislasi terhadap sistem demokrasi yaitu pertama, terjadinya *autocratic legalism* yaitu penggunaan hukum oleh penguasa untuk memperkuat posisi, yang mengorbankan demokrasi dan konstitusi. Kedua, produk hukum yang sifatnya ortodoks/konservatif produk hukum yang dihasilkan dari proses pembentukan yang tidak sesuai dengan prosedur, sebagai hasil dari konfigurasi politik otoriter. *Checks and balances* antara DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang sudah semestinya taat terhadap proses pembentukan undang-undang dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Sebab antara DPR dan Presiden terlibat sejak awal proses pembentukan undang-undang. Untuk mengurangi dampak dari problematika *checks and balances* antara DPR dan Presiden taat terhadap aturan proses pembentukan undang-undang dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat bermakna sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Problematika, Checks and Balances, Pemerintahan

SUMMARY

The government system is closely related to three axes of power: the executive, legislative, and judicial. In a government system, the relationship between the legislative and executive branches of government is crucial, as they exercise mutual control and balance in carrying out their duties. During Joko Widodo's first term, several issues arose, including the revision of the Corruption Eradication Commission (KPK) Law and the revision of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. During Joko Widodo's second term, several issues emerged, including the rapid enactment of laws, including the revision of the KPK Law, the Constitutional Court Law, and the omnibus law approach to the Job Creation Law. Furthermore, the revision of the Mineral and Coal Mining Law was also addressed. At the end of the term, Law No. 16 of 2010, the fourth revision of the Constitutional Court Law, was revised. These practices demonstrate the loss of checks and balances between the government and the House of Representatives (DPR).

The research method used is normative legal research, with descriptive-analytical research specifications. The research approaches used are historical, legislative, and conceptual.

The problematic checks and balances between the legislative and executive branches during Joko Widodo's administration in the legislative field is the formation of laws that do not comply with the formation process. First, they are not included in the national legislative program list. Second, the process is fast track. Third, the lack of meaningful participation ignoring Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, which requires three prerequisites: the right to be heard, the right to be considered, and the right to receive an explanation or answer to a justified opinion. Fourth, discussions are held during the transition periode. The impact of the problematic checks and balances between the legislature and the executive during the Joko Widodo administration in the field of legislation on the democratic system is first, the occurrence of autocratic legalism, namely the use of law by the authorities to strengthen their position, which sacrifices democracy and the constitution. Second, legal products that are orthodox/conservative in nature, legal products resulting from a formation process that does not comply with procedures, as a result of an authoritarian political configuration. The checks and balances between the House of Representatives (DPR) and the President in the formation of laws should comply with the process of law formation from the planning, drafting, discussion, ratification or determination, and promulgation stages. Because the DPR and the President are involved from the beginning of the law-making process. To mitigate the impact of problematic checks and balances between the DPR and the President, adherence to the rules of the law-making process and meaningful public participation are essential forms of popular sovereignty.

Keyword: Problematica, Checks and Balances, Government